

HARI JADI PROVINSI SUMATERA BARAT BERDASARKAN PERKEMBANGAN SEJARAH PEMERINTAHAN DAERAH*

Prof. Dr. phil. Gusti Asnan

(Staf Pengajar Jur. Sejarah Fak. Sastra Univ. Andalas Padang)

Adanya hari jadi bagi sebuah daerah baik setingkat provinsi atau kabupaten serta kota telah merupakan suatu keharusan di Indonesia akhir-akhir ini. Gejala yang mulai muncul pada dasawarsa 1970-an tampaknya masih akan tetap berlanjut, apalagi akhir-akhir ini – seiring dengan gerakan otonomi daerah – berbagai provinsi/kabupaten dan kota semakin membutuhkan adanya hari jadi itu. Hari jadi tidak hanya berarti sebagai suatu hari atau tanggal yang patut dikenang atau diperingati secara seremonial belaka, tetapi yang lebih penting dari itu adalah dijadikannya hari jadi tersebut sebagai patokan guna mengukur sejauh mana kemajuan yang dicapai oleh provinsi/kabupaten atau kota waktu ke waktu, bahkan ada daerah yang menjadikan hari jadinya sebagai bagian dari identitas dirinya serta bukti keberhasilannya “membebaskan diri dari” sesuatu yang tidak diharapkan.

Sejarah pencarian hari jadi provinsi/kabupaten dan juga kota di Indonesia dimulai dari usaha yang dirintis oleh daerah atau kota-kota besar di Pulau Jawa. Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Surabaya tercatat sebagai daerah dan kota yang pertama kali melakukannya. Upaya itu sudah dilakukan pada pertengahan dasawarsa 1970-an. Di tingkat Provinsi Sumatera Barat usaha pencarian hari jadi itu dilakukan pertama kali oleh Kota Padang. Namun berbeda dari daerah atau kota-kota besar di Pulau Jawa, kota Padang mulai melakukan itu pada pertengahan tahun 1980-an, tepatnya pada tahun 1986. Usaha kota Padang dilanjutkan oleh Bukittinggi. Selanjutnya kegiatan serupa juga dilakukan kota Payakumbuh, Solok, dan beberapa kota serta kabupaten lainnya.

*) Disampaikan pada Diskusi Penentuan Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat di Ruang Khusus I DPRD Provinsi Sumatera Barat, Padang, 19 April 2018.

Bila dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan oleh Jakarta, Surabaya dan Padang serta Bukittinggi, usaha yang dilakukan Provinsi Sumatera Barat akhir-akhir ini yakni mengadakan penelusuran hari jadinya dirasa sudah relatif terlambat. Namun, dengan merujuk kepada sebuah ungkapan yang sudah begitu populer di barat sana, “siapa yang menemukan paling akhir, itulah temuan yang terbaik” kita berharap bahwa penelusuran hari jadi Provinsi Sumatera akan membuahkan hasil yang betul-betul memuaskan kita semua, sebab banyak pengalaman mencari hari jadi yang dimiliki provinsi, kabupaten dan kota sebelum ini yang bisa kita manfaatkan.

Karena itu sebelum sampai pada diskusi hari jadi Provinsi Sumatera Barat ada baiknya kita bicarakan dulu mengenai beberapa kecenderungan yang ada selama ini tentang pencarian hari jadi itu.

Beberapa Kecenderungan Pencarian Hari Jadi

Sampai hari ini terlihat beberapa kecenderungan yang dilakukan oleh beberapa provinsi, kabupaten dan kota untuk mencari hari jadinya.

1. Dari aspek temporal (waktu)

Terlihat adanya kecenderungan untuk mencari hari jadi pada waktu yang jauh di masa silam, dengan kata lain “makin tua makin, makin diminati”.

2. Dari aspek tematis (heroisme)

Dari aspek ini terlihat adanya kecenderungan untuk mengaitkan hari jadi daerah atau kota dengan peristiwa atau kejadian yang mengandung unsur heroisme, yaitu adanya semangat perlawanan fisik dari daerah atau kota (warga kota) yang bersangkutan terhadap kaum penjajah.

3. Dari aspek yuridis formal

Umumnya aspek ini dikaitkan dengan ketentuan politis atau surat keputusan kapan daerah (provinsi/kabupaten) atau kota tersebut diresmikan sebagai sebuah daerah (provinsi/kabupaten) atau kota berdasarkan produk hukum (Undang-undang) yang dibuat negara.

Kecendrungan pertama telah menjadi fenomena sejak tahun-tahun pertama sejarah pencarian hari jadi daerah/kota dilakukan, terutama pada tahun 1970-an

dan 1980-an. Apa yang dilakukan oleh Jakarta, Surabaya dan Padang serta Bukit-tinggi misalnya adalah contoh nyata dari kecenderungan yang pertama ini. Kesemua kota itu telah berumur beratus-ratus tahun.

Kecenderungan kedua juga lahir pada tahun-tahun pertama munculnya keinginan sejumlah daerah/kota mencari hari jadinya. Apa yang dilakukan Jakarta dan Padang misalnya adalah dua contoh yang paling nyata. Jakarta mengambil hari jadinya pada tanggal 13 Agustus 1527 karena hari itu kesatuan tentara yang dipimpin Pangeran Jayakarta menyerang Sunda Kelapa yang telah dikuasai oleh VOC. Jayakarta berhasil menguasai kota itu untuk beberapa lama serta mengganti nama kota tersebut menjadi Jayakarta (nama yang akhirnya berubah menjadi Jakarta).

Gejala yang sama dilakukan pula oleh Padang, sebab pada tanggal 7 Agustus 1667 dikatakan bahwa penduduk Pauh yang didukung oleh penduduk beberapa kampung lain di kota Padang menyerbu loji Belanda yang ada di Muaro. Serangan itu menimbulkan kerugian besar pada VOC dan hampir saja membuat VOC membatalkan niatnya menjadikan Padang sebagai pusat kegiatan ekonomi, politik dan pemerintahannya.¹

Adanya kecenderungan untuk mencari hari jadi kota pada tahun-tahun yang jauh di masa lampau serta pada peristiwa-peristiwa heroik, sesungguhnya berkaitan erat dengan jiwa zaman (*Zeitgeist*) kapan pembuatan hari jadi kota itu dilaksanakan. Seperti yang telah disinggung di atas, sejarah pencarian hari jadi mulai menjadi fenomena dalam sejarah Indonesia sejak tahun 1970-an.² Seperti kita ketahui, tahun-tahun 1970-an adalah dasawarsa pertama bangsa Indonesia mulai mengalami kestabilan politik. Kestabilan ini bisa terwujud karena adanya kontrol yang kuat dari aparat keamanan serta tindakan yang represif dari pemerintah. Dengan kebijaksanaan dan sikap seperti ini gangguan-gangguan keamanan seperti yang terjadi di masa lampau – baik berupa gerakan daerah atau

¹ Di samping itu juga ada rumor yang mengatakan bahwa pemilihan tanggal 13 dan 7 Agustus oleh Jakarta dan Padang sebagai hari jadinya dimaksudkan supaya lebih dekat pelaksanaannya dengan perayaan kemerdekaan RI, supaya perayaannya bisa disamakan saja.

² Usaha ini sebetulnya bersamaan dengan dimulainya proyek penulisan sejarah nasional Indonesia yang diprakarsai oleh Dep. Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu.

pemberontakan atas dasar ideologi – relatif jarang terjadi. Tahun-tahun 1970-an adalah dekade pertama bagi bangsa Indonesia menikmati keberhasilan ekonomi yang cukup signifikan. Keberhasilan ekonomi ini antara lain berhubungan dengan tingginya harga minyak dan karet di pasaran dunia serta masuknya investor asing dan mulai bangkitnya pengusaha nasional (khusus untuk yang kedua ini berhubungan erat dengan kebijaksanaan pemerintah yang memberikan banyak kemudahan, bahkan berupa suntikan modal dan monopoli usaha).

Kestabilan politik dan adanya perbaikan ekonomi membutuhkan sarana untuk menjaganya. Salah satu sarana itu adalah kesamaan persepsi tentang identitas diri. Bila suatu kelompok masyarakat (atau suku bangsa dan bangsa) mempunyai kesamaan persepsi tentang dirinya (identitas dirinya), maka kestabilan politik akan lebih mudah dijaga dan dengan terjaganya kestabilan politik pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya akan bisa dipertahankan serta sekaligus bisa ditingkatkan. Pengalaman masa lalu Indonesia membuktikan bahwa sejarah (maksudnya penulisan sejarah) bisa dipergunakan sebagai sarana bagi penyamaan persepsi tentang identitas diri suatu kelompok masyarakat atau bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Tanpa bermaksud meniadakan arti dari usaha pemerintah kolonial, usaha menggunakan sejarah untuk menumbuhkan kesamaan persepsi atau pencarian identitas diri lewat sejarah telah dimulai oleh tokoh-tokoh Indonesia pada masa pergerakan. Sejak tahun 1926 misalnya, Sukarno telah sering mengatakan bahwa bangsa Indonesia mempunyai sejarah yang sama. Pada mulanya bangsa Indonesia memiliki sejarah yang gemilang dan itu ditandai dengan adanya kerajaan-kerajaan Hindu, Budha dan Islam yang besar. Kemudian setelah bangsa barat, terutama Belanda datang, Indonesia sama-sama memasuki zaman kegelapan yang penuh dengan penindasan. Hari ini (era pergerakan) Indonesia sama-sama bangkit menuju gerbang emas kemerdekaan.³ Pemanfaatan sejarah sebagai bahan untuk mencari dan penumbuhan identitas juga dipergunakan Mohammad Yamin. Yamin

³ Sukarno, *Di Bawah Bendera Revolusi* (Jakarta: Jembatan, 1963), 257-326.

misalnya mengatakan bahwa sesungguhnya Indonesia telah pernah bersatu di masa lampau, yakni semasa jayanya Sriwijaya dan Majapahit.⁴

Penggunaan sejarah oleh Sukarno dan Moh. Yamin serta beberapa tokoh pergerakan lainnya telah dapat menyamakan pemahaman bangsa Indonesia akan dirinya. Banyak ilmuwan asing yang mengakui “agitasi” tokoh-tokoh pergerakan dengan menggunakan sejarah tersebut terhunjam jauh ke lubuk hati bangsa Indonesia dan turut mempengaruhi kesediaan rakyatnya menerima Indonesia sebagai bangsanya. Sebagai kelanjutannya, kesediaan itu akhirnya membuat mereka rela berkorban harta dan nyawa demi memperjuangkan kemerdekaannya.⁵

Dari uraian di atas jelaslah bahwa sejarah telah digunakan untuk mencari dan menumbuhkan identitas. Karena itu ketika beberapa daerah/kota di Indonesia tahun 1970-an mulai mencari hari jadinya maka ingatan akan kejadian yang jauh di masa lampau dan kejadian itu bersifat heroik segera menjadi tumpuan.

Mengapa pilihan jatuh pada kejadian yang jauh di masa silam dan mengapa pula pada peristiwa yang heroik?

Dilihat dari kacamata ilmu sejarah, penelitian dan penulisan sejarah hari jadi daerah/kota seperti yang dikatakan di atas dapat dikatakan sebagai bagian dari sejarah konvensional. Sejarah konvensional memang cenderung mengambil batasan temporalnya pada kurun waktu yang jauh di masa silam dan cenderung membahas peristiwa-peristiwa besar yang bersifat heroik. Mengambil batasan waktu jauh ke masa silam berarti daerah atau kota tersebut telah lama umurnya (tua). Dalam masyarakat kita terdapat kepercayaan bahwa sesuatu yang tua berarti penuh kedewasaan, kearifan dan kematangan. Mengambil peristiwa heroik sebagai tonggak awal sejarah daerah/kota mengandung makna bahwa daerah/kota (warga kota) tersebut adalah orang-orang yang mau dan rela berkorban untuk kemajuan bangsa dan kotanya.

⁴ H.A.J. Klooster, *Indonesiërs Schrijven Hun Geschiedenis: De Ontwikkeling van de Indonesische Geschiedbeoefening in Theorie en Praktijk 1900-1980* (Dordrecht/Cincaminson: Foris Publications, 1985). Di samping itu ada banyak lagi tokoh pergerakan yang menggunakan sejarah sebagai dasar legitimasi pencarian identitas bangsa serta dasar bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Lebih lanjut lihat Herbert Feith dan Lance Castles, *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965* (Jakarta: LP3ES, 1995).

⁵ Klooster, *Indonesiërs.....*, hal. 43-44, 53, 85-87.

Tahun 1990-an kecenderungan mencari hari jadi ke masa-masa yang jauh di waktu lampau mulai ditinggalkan. Beberapa daerah/kota yang mencari hari jadinya pada dasawarsa itu memilih tanggal yang relatif tidak begitu jauh di masa lampau. Perubahan ini sebetulnya terjadi karena daerah-daerah/kota-kota yang mencari hari jadinya pada era 1990-an adalah daerah-daerah/kota-kota yang relatif kecil serta tidak memiliki “beban sejarah” yang berat. Apa yang dilakukan Payakumbuh, Solok dan Kabupaten Pasaman serta Sawahlunto/Sijunjung misalnya yang mencari hari jadinya pada tanggal kota itu diresmikan menjadi kota (kotamadya) dan kabupaten adalah contoh yang tepat untuk kasus ini. Dari kacamata ilmu sejarah, perubahan itu juga seiring dengan perkembangan kontemporer ilmu sejarah yang lebih cenderung mengkaji waktu yang tidak begitu jauh di masa silam serta aspek sejarah yang lebih bisa dibuktikan secara empiris.

Dalam suasana seperti inilah kita melakukan penelusuran mencari hari jadi Provinsi Sumatera Barati. Namun seperti yang diminta pihak sekretariat kepada saya, saya akan lebih mengonsentrasikan pembahasan saya kepada pencarian hari jadi Provinsi Sumatera Barat pada penelusuran sumber-sumber sejarah. Maksudnya, saya ingin mendiskusikan hari jadi Provinsi Sumatera Barat berdasarkan bukti-bukti empiris kapan daerah ini dibentuk sebagai sebuah unit administratif, meliputi hampir semua daerah yang dewasa ini menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Barat, dan kalau bisa tentu berhubungan pula dengan adanya peristiwa heroik yang terjadi di daerah ini. Sebelum masuk kepada suatu rumusan/tawaran teradap hari tertentu pada bagian berikut ini akan saya coba menampilkan perjalanan sejarah Sumatera Barat sebagai sebuah daerah administratif terlebih dahulu. Penyamaan persepsi dan pengetahuan ini saya pikir perlu dilakukan, karena kebetulan dari beberapa tulisan yang dibuat selama ini saya pikir kurang sesuai kenyataan historis.

Lintasan Historis Daerah Administratif Sumatera Barat

Provinsi Sumatera Barat adalah sebuah daerah administratif. Salah satu dari sekian banyak ciri daerah administratif adalah pembentukannya yang ditentukan oleh keputusan politik atau kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah.

Keputusan politik atau kebijakan pemerintah tersebut membuat bentuk, tingkatan dan kawasan teritorial sebuah daerah administratif bersifat statis. Namun di sisi lain, bukti-bukti sejarah menunjukkan bahwa sifat statis dari bentuk, tingkatan dan kawasan teritorial daerah administratif itu tidak dapat pula diterima sepenuhnya. Penentuan bentuk, tingkat, kawasan teritorial daerah administratif yang berdasarkan keputusan politik dan kebijakan pemerintah tersebut ternyata cenderung mengalami perubahan seiring dengan terjadinya perubahan pemerintahan (atau ada desakan warga masyarakat). Jadi kestatisan tersebut hanya berlaku untuk suatu kurun masa tertentu, dan di kurun waktu yang lain seiring dengan terjadinya perubahan pemerintahan atau desakan warga masyarakat, maka kestatisan itu akan mengalami perubahan lagi.

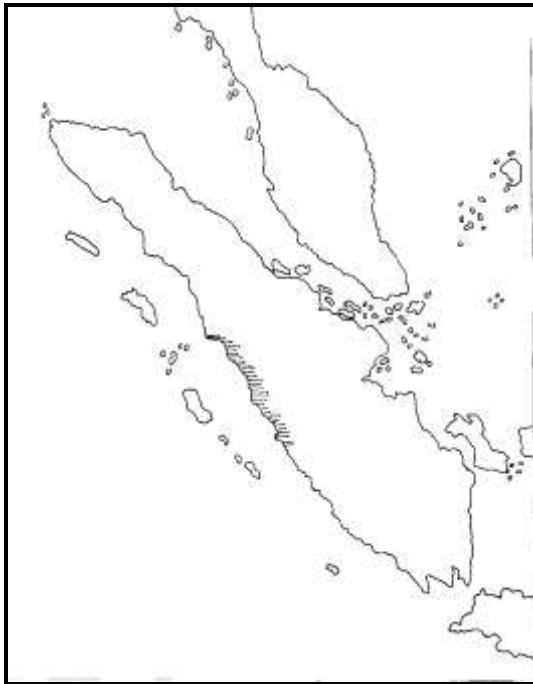
Cikal-bakal penggunaan nama Sumatera Barat menjadi sebuah daerah administratif dapat ditelusuri jauh kebelakang, setidaknya sejak perempat terakhir abad ke-17. Pada saat itu, Sumatera Barat dipergunakan untuk nama daerah administratif setingkat *hoofdcomptoir* yang dinamakan *Hoofdcomptoir Sumatra's Westkust* (Kawasan Perdagangan Utama Pantau Barat Sumatera). *Hoofdcomptoir* adalah salah satu unit administratif yang diperkenalkan oleh VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*). Sejak saat itu, hingga awal abad ke-19 wilayah yang menjadi bagian dari daerah administratif itu hanya terbatas pada daerah di pinggir pantai saja, dengan pusat-pusat politik dan ekonominya di beberapa kota yang ada lojinya, seperti Indrapura, Padang, Pulau Cingkuak, Padang, Pariaman, Tiku, Airbangis, Barus dan Singkel. Padang, di mana loji terbesarnya berada sekaligus mejadi ibukota daerah administratif ini. Berdasarkan informasi di atas, walaupun hanya mencakup kawasan dengan jarak yang tidak begitu jauh ke arah pedalaman, wilayah daerah administratif ini merentang panjang dari Indrapura selatan hingga Singkel di utara.



Peta 1

Hoofdcomptoir van Sumatra's Westkust Awal Abad ke-18

Nama Sumatera Barat (*Sumatra's Westkust*) sempat hilang dari penamaan daerah administratif sejak VOC dibubarkan (1799). Tidak saja penamaannya yang hilang, tetapi wilayah yang menjadi unit administratif tersebut juga jatuh kedalam kekuasaan Inggris atau kembali menjadi daerah merdeka. Inggris mengambilalih kekuasaan terhadap hampir seluruh wilayah *Hoofdcomptoir van Sumatra's Westkust* bagian selatan (mulai dari Airbangis hingga Indrapura). Secara administratif, oleh Inggris, kawasan ini dijadikan sebagai sebuah *residency* (*Residency of Padang*) dan menjadi bagian dari *Gouvernement Bengkulu*. Sedangkan daerah-daerah yang lain yang berada di bagian utara, mulai dari Natal hingga Singkel kembali menjadi daerah merdeka.



Peta 2
Residency of Padang 1900

Keadaan mulai berubah ketika Inggris menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah Hindia Belanda 1819. Sejak itu pemerintah Hindia Belanda mulai mengincar daerah pedalaman dan ingin memperluas wilayah kekuasaannya ke daerah pedalaman tersebut. Keinginan itu kemudian bisa diwujudkan, karena adanya permintaan bantuan oleh Alam Bagagarsyah dan sekelompok penghulu dari Tanahdatar kepada Belanda untuk memerangi kaum Paderi. Berdasarkan permintaan tersebut dan kemudian dikuatkan dengan Perjanjian 20 Februari 1820 maka Belanda mulai masuk ke pedalaman. Perlahan tetapi pasti, satu demi satu daerah pedalaman mulai jatuh ketangan Belanda. Seiring dengan perluasan daerah kekuasaan tersebut maka tahun 1823 Belanda melakukan reorganisasi pemerintahannya, dari *Residentie van Padang* menjadi *Residentie van Padang en Onderhorigheden* (Keresidenan Padang dan Daerah-daerah Taklukannya). Sesuai dengan namanya, wilayah yang menjadi bagian dari menjadi *Residentie van Padang en Onderhorigheden* mencakup sebagian besar kawasan pedalaman Minangkabau yang telah ditalukkan.



Peta 3
Residentie van Padang en Onderhorigheden 1823

Pemakaian nama menjadi *Residentie van Padang en Onderhorigheden* tetap dipertahankan hingga tahun 1837, ketika semua daerah pedalaman Minangkabau dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda dan Tuanku Imam Bonjol, pemimpin Perang Paderi berhasil ditangkap.

Dengan keberhasilannya mengakhiri perlawanan kaum Paderi, pemerintah Hindia Belanda melakukan kembali reorganisasi pemerintahannya. Saat itu status (level) daerah administratif untuk daerah ini ditingkatkan menjadi *gouvernement* (setingkat provinsi) dan namanya kembali menjadi *Sumatra's Westkust* (*Gouvernement van Sumatra's Westkust*) (*Besluit van Gouvernment Commissaris Cochius, 29 November 1837*).

Tidak puas dengan hanya menguasai kawasan yang identik dengan daerah budaya Minangkabau saja, pemerintah Hindia Belanda kemudian meluaskan ekspansi politiknya ke arah utara (Tanah Batak) dan juga pulau-pulau di lepas pantai barat Sumatera. Maka setelah melakukan berbagai kampanye militer, maka

tahun 1865 sebagian besar Tanah Batak dan Pulau Nias serta Kepulauan Mentawai berhasil diduduki dan dijadikan sebagai bagian daerah administratif *Sumatra's Westkust*.



Peta 4
Gouvernement Sumatra's Westkust 1865

Pada awal abad ke-20, seiring dengan semakin dinamisnya perkembangan sosial, politik, dan ekonomi di Tanah Batak dan Minangkabau, maka Batavia memutuskan untuk menjadikan kedua daerah budaya menjadi dua daerah administratif, yakni *Gouvernement van Sumatra's Westkust* untuk kawasan yang identik dengan daerah budaya Minangkabau (termasuk daerah Kampar) dan *Residentie van Tapanoeli* untuk kawasan yang identik dengan daerah budaya Batak (*Staatsblad van Nederlandsch-Indie*, No. 419, 1905). Namun ada yang menarik dari pembentukan kedua daerah administratif ini, ke dalam *Gouvernement van Sumatra's Westkust* juga dimasukkan Kepulauan Mentawai (yang secara etnik tidak sama sama dengan orang Minangkabau) dan ke dalam

Residentie van Tapanoeli dimasukkan Pulau Nias dan Pulau Batu serta Pulau Telo yang secara etnik tidak sama dengan orang Batak.

Enam tahun setelah itu, status (level) unit pemerintahahan untuk *Sumatra's Westkust* diturunkan menjadi *residentie* dan dinamakan Residentie van *Sumatra's Westkust*. Keputusan ini dimuat dalam *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* 1913 No. 321 (diperkuat lagi oleh apa yang diungkapkan dalam *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* 1913 No. 569 dan 1914 No. 3030).



Peta 5
Gouvernement van Sumatra's Westkust

Pasca-pemberontakan Siliungkang, tepatnya tahun 1929, sekali lagi pemerintah Hindia Belanda melakukan reorganisasi pemerintahannya di Sumatera Barat. Saat itu, seiring dengan ekspansi politik yang dilakuka ke arah selatan, wilayah administartif Sumatera Barat juga dipeluas sehingga mencakup daerah

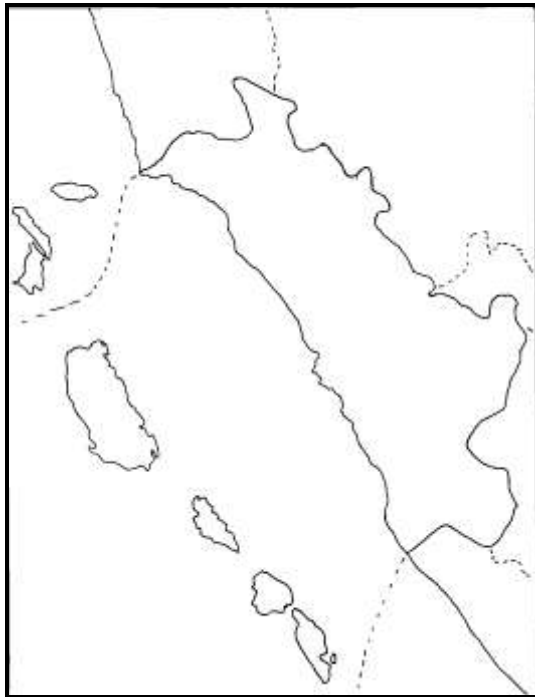
Kerinci. Bahkan Sungaipenuh dijadikan sebagai ibukota dari *Afdeeling Kerintji-Painan*.⁶



Peta 6
Residentie van Sumatra's Westkust

Pada masa penduduk Jepang (1942-1945) nama Sumatera Barat tetap dipakai sebagai penamaan daerah administratif, yakni *Sumatora Nishi Kaigan Shu* (Keresidenan Pantai Barat Sumatera). Pada saat itu ada sedikit perubahan wilayah administratif, daerah Kampar dikeluarkan dari Sumatera Barat dan masukkan ke dalam *Riau Shu* (Keresidenan Riau).

⁶ *Afdeeling* daerah administrative tingkat kabupaten.

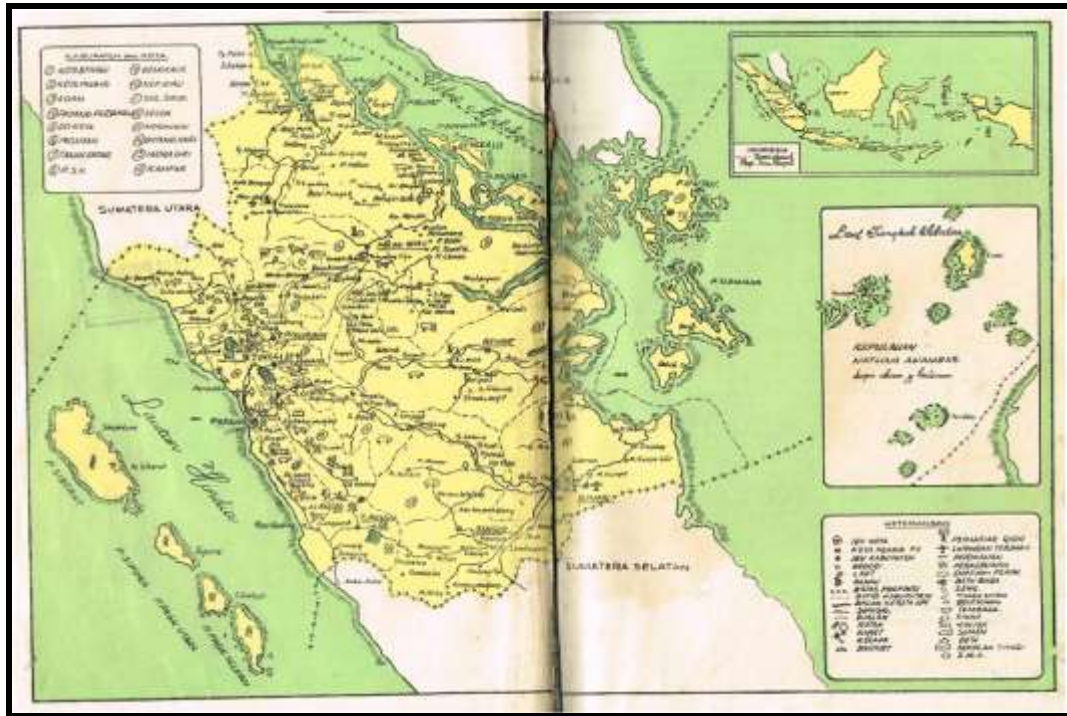


Peta 7
Somatora Nishi Kaigan Shu
Zaman Jepang

Kondisi yang sama tetap berlaku ketika Indonesia merdeka (17 Agustus 1945) dan pemerintah RI (Republik Indonesia) membentuk Provinsi Sumatera dengan 10 keresidenannya, yang salah satu diantaranya adalah Keresidenan Sumatera Barat. Saat itu, pemerintahan menegaskan pengakuan akan wilayah administratif yang identik dengan daerah budaya Minangkabau plus Kerinci (dan dikurangi Kampar) ditambah dengan Kepulauan Mentawai. Dengan kata lain, pada saat Indonesia merdeka wilayah administratif Keresidenan Sumatera Barat sama dengan keadaannya pada masa Jepang.

Berdasarkan Undang-undang No. 10/1948 yang disetujui tanggal 15 April 1948 Jakarta membentuk tiga provinsi di Sumatera, salah satu di antaranya adalah Provinsi Sumatera Tengah. Sumatera Barat menjadi salah satu dari tiga keresidenan di provinsi ini (dua lagi adalah Keresidenan Riau dan Jambi). Pasca-pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda sesuai KMB (Konferensi Meja Bundar), maka berdasarkan Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) No. 4/1950 yang ditetapkan 14 Agustus 1950, sekali lagi ditegaskan bahwa

keberadaan Provinsi Sumatera Tengah yang mencakup Keresidenan Sumatera Barat Riau dan Jambi dengan ibukota Bukittinggi.



Peta 8
Provinsi Sumatera Tengah

Status administratif dan peta wilayah Sumatera Barat mengalami perubahan yang drastis dan sejak saat itu tidak berubah lagi tahun 1957. Perubahan ini berhubungan erat dengan gejolak politik daerah, yakni diambilalihnya pemerintah daerah Sumatera Tengah oleh Dewan Banteng. Tahun itu Jakarta memberlakukan UU Darurat No. 19 tertanggal 9 Agustus 1957 yang isinya membubarkan Provinsi Sumatera Tengah yang dibentuk dengan Perpu No. 4 tahun 1950. Selanjutnya UU itu memecah bekas Provinsi Sumatera Tengah tersebut menjadi tiga Daerah Swatantra Tingkat I (waktu itu lazim dikenal dengan Daswati I), yaitu: 1). Provinsi Sumatera Barat; 2). Provinsi Riau , dan 3). Provinsi Jambi. Melalui UU tersebut daerah kerinci dikeluarkan dari Sumatera Barat dan dimasukkan kedalam Provinsi Jambi. Sejak saat itu hingga saat sekarang wilayah administratif Sumatera Barat tidak mengalami perubahan lagi.



Peta 9
Provinsi Sumatera Barat

Pengalaman Sejarah dan Hari Jadi

Berdasarkan penjelasan dari lintasan perjalanan sejarah daerah administratif Sumatera Barat di atas, rasanya sangat menarik untuk memberikan perhatian kepada hasil reorganisasi tahun 1905, 1927, 1945, serta 1957. Ada sejumlah alasan yang menyebabkan tiga reorganisasi tersebut perlu diberi perhatian khusus. Pertama, reorganisasi tahun 1905 adalah reorganisasi yang menyebabkan daerah administratif *Gouvernement van Sumatra's Westkust* yang daerahnya identik dengan Sumatera Barat dewasa ini. Bedanya hanya ditambah dengan daerah Kampar (Peta 3). Tidak itu saja, reorganisasi tahun 1905 ini juga menjadikan daerah administratif *Gouvernement van Sumatra's Westkust* identik dengan daerah budaya Minangkabau (kecuali Kepulauan Mentawai). Reorganisasi tahun 1927 adalah reorganisasi yang memasukkan daerah Kerinci sebagai bagian dari wilayah *Residentie van Sumatra's Westkust*. Artinya melalui reorganisasi 1927 ini

wilayah *Residentie van Sumatra's Westkust* sekaligus meliputi daerah-daerah rantau Minangkabau semuanya (kecuali Rantau Kuantan). Reorganisasi tahun 1945 menjadikan wilayah yang menjadi bagian Keresidenan Sumatera Barat identik dengan keadaan sekarang, minus Kampar. Sedangkan reorganisasi tahun 1957 menjadi Sumatera Barat menjadi daerah administratif provinsi dengan nama Provinsi Sumatera dan dengan wilayah yang identik dengan wilayah sekarang.

Berdasarkan empat deskripsi di atas, kiranya empat kejadian historis itu layak dipertimbangkan untuk menjadi dasar pemilihan hari jadi Provinsi Sumatera Barat. Di samping memiliki kekuatan, yakni dipakaikannya nama Sumatera Barat sebagai nama wilayah administratif, juga telah terhimpunnya hampir semua daerah yang menjadi bagian Sumatera Barat dewasa ini ke dalam unit administratifnya. Namun tentu tidak mungkin keempat titik waktu itu dipilih. Lalu titik waktu manakah yang paling layak untuk dipertimbangkan?

Dari tiga titik waktu itu, kiranya yang paling layak dipertimbangan adalah tahun 1957. Titik waktu tersebut, di samping memiliki kekuatan seperti yang disebut di atas, juga memiliki arti kekuatan aspek yuridis-formal dan teritorial yang jauh lebih bisa dipertanggungjawabkan dan konkrit dibandingkan dengan titik-titik waktu yang lain. Dengan kata lain, tanggal ini lebih empiris.

Berdasarkan keterangan itu, maka dalam kesempatan ini saya ingin menyarankan agar pencarian hari jadi Provinsi Sumatera Barat sebaiknya diarahkan kepada aspek yuridis formal terbentuk daerah administratif yang status administratif dan wilayahnya identik dengan keadaan sekarang ini. Untuk itu saya cenderung menjadikan tanggal 9 Agustus 1957 sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Barat. Aspek lain (walaupun ini sifatnya subyektif) yang juga bisa dijadikan dasar pemilihan hari jadi Sumatera Barat tanggal 9 Agustus adalah agar waktu perayaannya tidak begitu jauh bedanya dengan peringatan proklamasi kemerdekaan RI.

Akhirul Kalam

Pengalaman berbagai provinsi, kabupaten, dan kota yang telah mendapatkan atau telah menetapkan hari jadinya, menunjukkan bahwa penetapan hari jadi akhirnya

terpulang kepada kesepakakatan berbagai pihak dari berbagai alternatif yang diajukan. Dan pengalaman mereka juga menunjukkan, bahwa senantiasa saja ada pihak atau kalangan yang tidak puas dengan pilihan yang telah ditetapkan. Memuaskan semua pihak pasti tidak bisa, yang bisa dilakukan adalah memilih yang terbaik dari sejumlah ide dan gagasan yang baik.

-----ooo0ooo-----